PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARDIANA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPARTEMEN ILMU GIZI**
3. NHK : **458897**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 2.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/440 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 602.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FIRST Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, MG MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 20.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 25.383.308**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.097.883.308**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.097.883.308**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.